

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

II.1 Kabupaten Sleman

II.1.1 Letak Wilayah Kabupaten Sleman

Secara geografis, Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan yang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(<http://www.sleman.go.id/profil-kabupaten-sleman> Diakses pada 11 Mei 2017).

II.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berjarak ±15 km dari Kota Yogyakarta dan memiliki luas wilayah secara keseluruhan 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km². Jumlah penduduk

keseluruhan di Kabupaten Sleman ±1.093.110 jiwa dengan kepadatan 1.901,66 jiwa/km². (<http://www.sleman.go.id/profil-kabupaten-sleman> Diakses pada 11 Mei 2017).

II.1.3 Sejarah Kabupaten Sleman

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati.

Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1,

Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846.

Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijktsblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah (www.slemankab.go.id tanggal 09 Januari 2017 pukul 01:22).

II.1.4 Pembagian Wilayah Secara Administratif

Secara Administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel II.1**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.652	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,75
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
Jumlah		86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber : www.sleman.go.id

II.1.5 Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

1. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan

ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
3. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
4. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping.

Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
2. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
3. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

II.2 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman

II.2.1 Sejarah Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sleman

Dimulai dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah Kabupaten dapat membentuk atau membuat beberapa lembaga sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pembangunan di daerah

masing-masing. Efek munculnya dari undang-undang tersebut, Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. dengan demikian, diharapkan lembaga tersebut dapat memaksimalkan pembangunan daerah atau fungsi-fungsi di Kabupaten Sleman.

Pada evaluasi organisasi perangkat daerah tahun 2003 di Kabupaten Sleman, terbitlah peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2000. Kemudian Kabupaten Sleman mengevaluasi beberapa perubahan salah satunya adalah Kantor Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Badan Kepegawaian Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 kedudukan, adalah :

1. Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah.

II.2.2 Visi

“Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional”

Dari visi tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sleman ingin memiliki aparatur yang benar-benar mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi dari setiap pegawai. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, moral, kedisiplinan, ketulusan, keikhlasan, dan dari berbagai aspek untuk mencapai nilai profesionalitas di berbagai segi supaya dapat mencapai ke tingkat misi dari Kabupaten Sleman itu sendiri.

II.2.3 Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai.
3. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas.

Penjelasan dari setiap poin :

1. Misi tersebut merupakan keinginan atau harapan untuk memajukan Kabupaten Sleman dengan meningkatkan sumber daya manusia baik secara struktural dan fungsional.
2. Misi tersebut merupakan implementasi dari pengembangan manajemen kepegawaian. Salah satunya adalah pengembangan karier ataupun kaderisasi.
3. Misi tersebut merupakan tindakan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

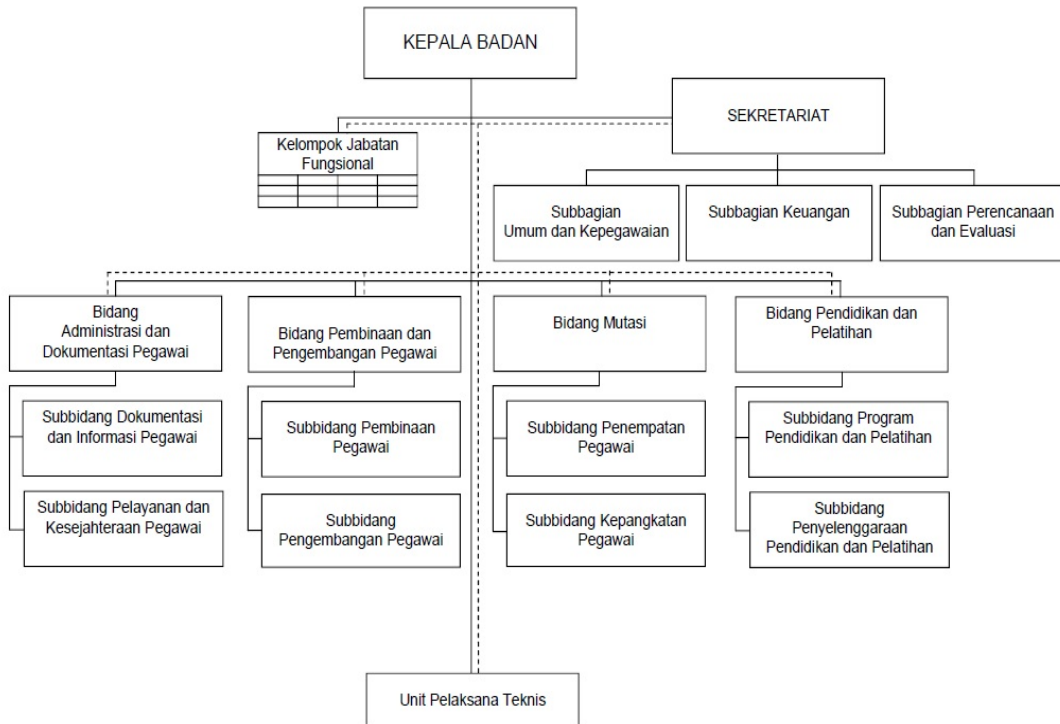
II.2.4 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2011 terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, dan Evaluasi
3. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai , terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Dokumen dan Informasi Pegawai
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
4. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
5. Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penempatan Pegawai
 - b. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Progam Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sleman



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sleman

II.2.5 Tujuan dan Fungsi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi perubahan yang dimana perubahan tersebut dapat membawa atau mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan memperbaiki sektor publik.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana sudah menjadi pola dalam ideologi otonomi daerah. Untuk saat ini Pemerintah Daerah ditekankan harus mampu mengatur, mengembangkan, dan

memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumber daya aparatur.

Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu unsur pendukung pemerintah daerah yang di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan perannya Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kepegawaian daerah
2. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah
4. Pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah
5. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah, dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman 2014).

II.2.6 Uraian Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 Subbagian:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian

- Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga
 - Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- Penyusunan perencanaan subbagian perencanaan dan evaluasi
 - Pengoordinasian penyusunan rencana kerja
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
- c. Subbagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- Penyusunan perencanaan kerja Subbagian Keuangan
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan
2. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai terdiri dari 2 Subbidang yaitu:

a. Sub Bidang Dokumentasi dan informasi pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumentasi dan informasi pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai
- Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi, dan informasi pegawai
- Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai

b. Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
- Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai

- Pembinaan dan pengoordinasian pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier terdiri dari 2 Subbidang yaitu:
- a. Sub Bidang Pembinaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai
 - Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja Subbidang pengembangan pegawai
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pegawai
 - Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai

- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pegawai

4. Bidang Mutasi terdiri dari 2 Subbidang yaitu:

a. Sub Bidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang penempatan pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan penempatan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai

b. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dalam pelaksanaan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepangkatan pegawai

- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai
- Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
- Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengakatk pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 2 Subbidang:

a. Sub Bidang Progam Pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Progam Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis progam pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan progam pendidikan dan pelatihan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Progam Pendidikan dan Pelatihan

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
- Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

II.2.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman menurut jenjang kepangkatan tingkat pendidikan formal.

Tabel II.2

Data Pegawai Menurut Golongan

No	GOLRU	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	II/a	1	0	1
2	II/b	3	0	3
3	II/c	1	0	1
4	II/d	1	1	2
5	III/a	5	2	7
6	III/b	17	12	29
7	III/c	6	3	9
8	III/d	3	1	4
9	IV/a	3	3	6
10	IV/b	0	1	1
11	IV/c	1	0	1
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa data pegawai menurut golongan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman terbanyak adalah golongan III/b sebanyak 29 orang, yang kedua adalah golongan III/c sebanyak 9 orang, kemudian golongan III/a sebanyak 7 orang, golongan IV/a sebanyak 6 orang, golongan III/d sebanyak 4 orang, golongan II/b sebanyak 3 orang, golongan II/d

sebanyak 2 orang, golongan IV/b sebanyak 1 orang, dan yang terakhir adalah golongan IV/c sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan adalah 64 orang.

Tabel II.3

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	TK_PEND	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	D.III	0	3	3
2	D.IV	1	0	1
3	S-1	19	10	29
4	S-2	8	5	13
5	SD	1	0	1
6	SLTA	12	5	17
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

Dari tabel diatas data pegawai menurut pendidikan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dimulai dari urutan paling sedikit adalah tingkat SD sebanyak 1 orang sama dengan tingkat D.IV sebanyak 1 orang, yang kedua tingkat D.III sebanyak 3 orang, yang ketiga tingkat S-2 sebanyak 13, yang keempat tingkat SLTA sebanyak 17, dan yang paling mendominasi adalah tingkat S-1 sebanyak 29. Jumlah keseluruhan adalah 64 orang.

Tabel II.4

Data Pejabat

No	ESELON	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	II.b	1	0	1
2	III.a	0	1	1
3	III.b	3	1	4
4	IV.a	8	3	11
5	JFV/JFT	29	18	47
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa data pejabat eselon di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dari urutan paling bawah adalah eselon II.a sebanyak 1 orang sama dengan eselon II.b sebanyak 1 orang, kemudian yang kedua adalah eselon III.b sebanyak 4 orang, yang ketiga eselon IV.a sebanyak 11 orang, dan urutan paling atas yang mendominasi adalah eselon JFV/JFT sebanyak 47 orang. Jumlah keseluruhan adalah 64 orang.

II.2.8 Data Prestasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kategori Kinerja OPD/UPT berprestasi Tahun 2016 dengan peringkat terbaik (www.bkd.slemankab.go.id tanggal 10 Januari 2017 pukul 23:31).

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman berhasil meraih penghargaan atas Pengelola Kepegawain Terbaik dari BKN Award 2015 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara Rakornas

Kepegawaian di Jakarta pada 10 Juni 2015 (www.bkn.go.id tanggal 10 Januari 2017 pukul 23:37).

Tabel II.5

Pemerintah Kabupaten/Kota Pemenang Badan Kepegawaian Award

Tahun 2015

No	Kategori	Instansi Pemenang
1	Perencanaan Kepegawaian Terbaik	1. Kota Sungai Penuh
		2. Kab. Malinau
		3. Kab. Teluk Wondama
2	Implementasi Rekrutmen Berbasis Teknologi Informasi Terbaik	1. Kota Salatiga
		2. Kab. Banyuwangi
		3. Kab. Bogor
3	Komitmen Tertinggi Rekrutmen CPNS Berbasis CAT	1. Kab. Manggarai Barat
		2. Kab. Maluku Barat Daya
		3. Kab. Pohnomo
4	Implementasi SAPK Terbaik	1. Kota Surabaya
		2. Kota Metro
		3. Kota Belitung
5	Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik	1. Kota Medan
		2. Kota Makassar
		3. Kota Pekanbaru
6	Konsistensi Pemanfaatan Hasil Assessment Center	Kota Balikpapan
7	Pelayanan Mutasi Kepegawaian Terbaik	1. Kab. Kulon Progo
		2. Kab. Agam
		3. Kota Sorong
8	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Terbaik	1. Kab. Nabire
		2. Kab. Wajo
		3. Kab. Belitung Timur
9	Pengembangan SDM ASN Terbaik	1. Kab. Sorong
		2. Kota Denpasar
		3. Kab. Bantaeng
10	BKD Kabupaten/Kota Inofatif	1. Kota Banda Aceh
		2. Kota Tarakan
		3. Kab. Seram Bagian Timur
11	Pengelola Kepegawaian Terbaik	1. Kab. Sleman
		2. Kab. Wajo
		3. Kota Padang

Sumber : www.bkn.go.id